

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sedang berkembang yang mana sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian di Indonesia dan dengan hal itu tak heran bahwasannya profesi penduduk Indonesia mayoritas adalah petani. Dataran tanah yang subur di nusantara ini menjadikan potensi untuk membuka kesempatan bagi warganya dalam bercocok tanam, sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakat.

Pembangunan harus terus berjalan di Indonesia. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Sektor pertanian berperan sangat penting karena merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa. peluang terbesar penyerap tenaga kerja di Indonesia ada di sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian pemerintah, karena tumbuh kembangnya sektor pertanian salah satu kunci pembangunan nasional (Saheb, Slamet dan Zuber, 2018).

Besarnya potensi yang dimiliki dan besarnya kebutuhan dibidang pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan dalam dirinya maupun lingkungannya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat menjadi mandiri dan mampu dalam menentukan pilihan dalam mengatasi permasalahan. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduknya yang hidup disektor pertanian tersebut (Arsyat, 2010).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan Pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Pemberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang mampu menyejahterakan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting. Adanya

masalah yang dihadapi para petani antara lain pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam hal ini pembentukan kelompok tani, dari kelompok tani inilah nantinya masyarakat petani akan diberdayakan sehingga produktivitas akan lebih efektif dan efisien dengan kerjasama Pemerintah Daerah.

Pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan. Pertanian organik merupakan salah satu langkah yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan (Abadi, 2009). Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis, dengan tujuan untuk menyediakan bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan tidak merusak lingkungan. Sebenarnya pola pertanian organik sudah tumbuh lama didasari oleh kesadaran masyarakat petani akan faktor produktivitas lahan, faktor ekonomi, keseimbangan ekosistem dan juga faktor kesehatan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku industri pertanian dan khususnya petani untuk kembali ke pola pertanian organik. Namun memang dirasa perlu untuk membuat suatu gerakan agar program organik dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Salah satu upaya pemerintah untuk kembali ke pertanian organik agar

berjalan cepat dan terarah adalah dengan mencangkan program *go organic*. Program *go organic* merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menunjang program ketahanan dan kemandirian di bidang pertanian.

Go organic adalah momentum dimulainya pemasyarakatan pertanian organik dalam skala luas. Dengan dicanangkannya *go organic* oleh pemerintah, maka diharapkan berkembang seluruh industri di sektor pertanian. Salah satunya adalah para pelaku industri pupuk organik. Skala industri para pelaku pupuk organik bukan hanya berskala besar, tetap juga skala rumah tangga. Dengan memanfaatkan limbah dan bahan organik di lingkungan maka akan menghasilkan nilai tambah ekonomis dan sosial budaya. Karena itu pertumbuhan industri pupuk organik seharusnya didukung dan dikembangkan (Sinar Tani, 2010).

Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program *go organic* sejak tahun 2012. Program ini terlaksana atas kerjasama pemerintah daerah beserta pemerintah kecamatan yang diikuti oleh beberapa kelompok tani di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Para petani di kelompok tani tersebut mencoba menerapkan perubahan sistem pengolahan pertanian dari anorganik menjadi organik. Salah satu bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah melalui pemberian pupuk organik.

Sistem pupuk organik menggunakan bahan-bahan alam. Seperti halnya dalam pupuk yang digunakan yaitu memanfaatkan kotoran ternak, sampah rumah tangga,

sampah pasar dan jerami. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya padi mampu memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi petani. Keberadaan pertanian organik selain mendukung keberlangsungan ekosistem tanah juga menurunkan harga pengolahan lahan pertanian. Hal ini membuat kelompok tani di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi menjadi konsep Kelompok tani mandiri berbasis pertanian ramah lingkungan.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Hamid (2018) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel penelitian sebanyak 10 orang ditetapkan secara *snowball sampling* (aparatur Dinas Pertanian, Kab. Ka. BPP/KCD Kecamatan, PPL, dan petani). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan petani yang dilaksanakan telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal (produksi padi tahun 2013 6,5 ton/ha menjadi 7,58 ton/ha). Kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengadaan alsintan, program PUAP, dll. Faktor penghambatnya: kondisi jaringan irigasi belum memadai, ketersediaan benih padi dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan, jumlah alsintan belum memadai, pembinaan manajemen kelompok belum optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan petani padi yang menggunakan

budidaya pertanian organik. Untuk itu penulis mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Organik Di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani padi organik di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Petani Padi organik di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani padi organik di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
2. Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Petani Padi organik di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan referensi tentang pemberdayaan petani padi organik di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta Kecamatan dan Kabupaten lainnya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang pertanian dan diharapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mendukung pemberdayaan petani padi organik.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- d. Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bahan bacaan atau sebagai literatur.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut maka akan diuraikan penegasan istilah yang terdapat di dalam judul sebagaimana berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014).

2. Petani

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut. Peranan petani sebagai pengelola usaha tani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisir faktor-faktor produksi yang diketahui (Hermanto, 2011).

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Nugroho, 2010).

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Rosmedi, 2006).

F. Landasan Teori

1. Konsep Peran dan Pemerintah Daerah

Mengenai pengertian peranan maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Westra (Tuti, 2003: 9) mengatakan bahwa peranan adalah terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Palak (Tuti, 2003: 9) yang berpendapat bahwa peranan atau *role* adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu.

Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah pemerintah. Pemerintah sebagai personifikasi negara berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personifikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier. Birokrasi pemerintah di tingkat pusat disebut kementerian Negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thoha (Sembiring (2012: 1) bahwa peran birokrasi menjadi mengemuka karena didalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-

urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan mengantungkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam “*public policy*” sangat penting.

Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Kencana, 2011: 8-12).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaran kekuasaan. Menurut Yusuf (2014), diperlukan peranan dari pemerintah secara optimal dan mendalam guna memberdayakan masyarakat, oleh karena itu dibawah ini merupakan penjelasan beberapa peran pemerintah yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

b. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang

tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

Adapun beberapa indikator yang tercantum dalam 4 (empat) peran pemerintah untuk pembangunan (Siagian, 2016) antara lain :

a. Peran Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Salah satu tugas fasilitator diantara ada dua yang mendasar, yaitu:

- 1) Fasilitator di Bidang Pendampingan. Dimana Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan.
- 2) Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu membantu petani mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.

b. Peran sebagai inovator

Pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator yaitu memberikan inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru dan menjadi sumber dari hal-hal baru. Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain:

- 1) Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

- 2) Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu.
- 3) Inovasi yang sifatnya kondepsional.
- 4) Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Kemampuan sebagai inovator pembangunan. Yaitu kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

c. Peran sebagai modernisator

Pemerintah bertugas mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang ada sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan rakyat maupun mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.

d. Peran sebagai pelopor,

Pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikan oleh orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya karena ketika pemerintah

mengeluarkan *statement* akan suatu (dilarang korupsi) tetapi mereka (orang-orang parlemen) yang melakukan hal tersebut. Sehingga pada akhirnya tumbuhlah rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan pengertian yang ada di atas, pemerintah harus menyelenggarakan peradilan yang mana peradilan itu harus merata untuk semua lapisan masyarakat. Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan melibatkan pemerintah secara optimal dan mendalam.

Menurut Sembiring (2012: 3) fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah dimanapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi pelayanan (*services*), fungsi pengaturan (*regulation*), dan fungsi pemberdayaan (*empowering*), dalam upaya mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Hamdi (2002: 8) fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum.

Pelayanan terhadap hak-hak masyarakat berisi kegiatan untuk memudahkan masyarakat menikmati hidupnya yang patut atau pantas sesuai

dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaannya. Sedangkan pelayanan terhadap kewajiban masyarakat berisi kegiatan untuk memampukan masyarakat memahami kepatuhan kolektif yang semestinya dikembangkan. Pelayanan ini kemudian sangat berkaitan dengan fungsi pemberdayaan.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pertanian

Adapun peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertanian meliputi (Sukirno, 2011: 37):

a. Revitalitas Lahan

Revitalitas adalah sesuatu proses atau cara dan pembuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalitas berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Jadi revitalisasi lahan adalah menghidupkan kembali atau pemanfaatan kembali lahan pertanian yang selama ini sempat mati atau tidak diolah. Revitalisasi lahan adalah kesadaran untuk menempatkan kembali ati menyegarkan kembali vitalis memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Sukirno, 2011: 37).

Revitalisasi lahan mempunyai tiga pilar pengertian yaitu pertama pengertian revitalisasi lahan sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Kedua, revitalisasi pertanian

sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi pertanian. Ketiga, revitalisasi adalah sebagai kebijakan dalam strategi besar melakukan proses revitalisasi itu sendiri. Revitalisasi pertanian juga diartikan sebagai usaha, proses dan kebijakan untuk menyegarkan kembali daya hidup pertanian, memberdayakan kemampuan, membangun daya saing, meningkatkan kinerja serta menyejahterakan pelakunya terutama petani, nelayan dan petani hutan sebagai bagian dari usaha untuk menyejahterakan seluruh rakyat (Mudjarat, 2010: 78).

Pembangunan pertanian merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam yang dilakukan antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan mendorong dalam hal ini pembangunan pertanian, serta para petani sebagai pelaku utama di lapangan dalam pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian juga dikatakan sebagai membangun ekonomi disektor pertanian, karena pertanian memang merupakan salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi. Pertanian adalah usaha manusia melalui kehidupan tumbuhan dan hewan untuk dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya (Umar, 2008).

b. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pertanian

1) Infrastruktur

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transformasi, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial (Nurmadimah, 2012: 19). Infrastruktur merupakan salah satu yang dapat membantu dan mendorong program pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan, dalam hal ini infrastruktur petani menjadi lebih mudah karena tanpa adanya dukungan infrastruktur program pembangunan pertanian tidak akan berjalan dengan maksimal bahkan tidak berhasil. Adapun infrastruktur yang termasuk didalamnya adalah jalan, jaringan irigasi dan bendungan.

2) Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian. Sarana merupakan bahan yang sangat menentukan di dalam budidaya tanaman pada suatu wilayah tertentu. Sarana produksi berperan penting didalam usaha mencapai produksi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun sarana dan prasarana pertanian meliputi (Sukirno, 2015: 16):

a) Sarana pertanian

- (1) Alat-alat mesin pertanian.
- (2) Pupuk
- (3) Bibit/benih
- (4) Transportasi alat angkut pertanian

b) Prasarana Pertanian

(1) Jalan Usaha Tani

(2) Pasar Tani

(3) Koperasi Pertanian

c. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupan (Samsudin, 2008). Penyuluhan adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku kegiatan agrobisnis melalui kegiatan pendidikan nonformal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga pendapatan petani dan kesejahteraannya meningkat (Deptan, 2000).

Terdapat 5 kegiatan dalam dalam penyuluhan pertanian yaitu sebagai berikut (Deptan, 2000):

- 1) Memfasilitasi proses dan kegiatan pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agrobisnis.
- 2) Memberikan rekomendasi penyuluhan dan mengikhtiarkan akses petani dan keluarganya kesumber informasi dan sumber daya yang akan membantu pengertian mereka dalam pemecahan masalahnya.
- 3) Membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan

- 4) Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi ekonomi dan sosial yang tangguh.
- 5) Menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai lembaga mediasi dan kegiatan intermediasi terutama yang menyangkut pengertian teknologi bagi kepentingan petani dan keluarganya.

3. Pertanian Organik

Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Keberlanjutan sumber daya alam perlu dipikirkan agar lahan pertanian tidak semakin rusak atau sakit karena terlalu banyak menerima masukan bahan kimia. Pertanian organik dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi kerusakan alam tersebut. Pertanian organik merupakan suatu sistem produksi pertanian yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati. Daur ulang hara tersebut dapat melalui sarana limbah tanaman maupun ternak, serta limbah lainnya yang mampu mengembalikan kesuburan dan struktur tanah (Sutanto, 2002).

Sistem pertanian organik berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal, tanpa penggunaan pupuk buatan dan pestisida kimia (kecuali bahan yang diperkenankan), namun menekankan pada penggunaan pupuk organik (alam) dan pestisida hayati serta cara-cara budidaya lainnya yang tetap berpijak pada peningkatan produksi dan pendapatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Tandisau dan Hernawati, 2009). Jadi, pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan untuk melindungi ekosistem alam dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia.

Menurut Mayrowani (2012) pertanian organik sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dengan teknik tersebut adalah padi, hortikultura sayuran dan buah, tanaman perkebunan, dan rempah-rempah. Menurut IFOAM (*International Federation of Organic Agricultural Movement*, 2005), pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian yang harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Menurut IFOAM (*International Federation Of Organic Agriculture Movement*, 2015) pertanian organik dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kesehatan, pertanian organik melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan dan bumi sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan
- b. Prinsip ekologi, pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan

- c. Prinsip keadilan, pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
- d. Prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan sistem pertanian organik menurut IFOAM antara lain:

- a. Mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna, tanah, tanaman serta hewan;
- b. Memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian (terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang aman dan sehat,
- c. Memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

4. Pemberdayaan Petani Padi

Defenisi Pemberdayaan menurut Theresia (2015: 91) merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis untuk mendorong semua potensi yang ada bertindak secara evolutif dengan keterlibatan dari semua potensi. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu

pemberdayaan dibidang kelompok tani padi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Menurut Sedarmayanti (2013:105) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan atau *empowerment* yang artinya suatu pemberdayaan di dalam meningkatkan potensi manusia agar dapat berorientasi pada pertanggung jawaban kerja yang dilakukan dengan cara yang logis untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berpontesi untuk dikembangkan sesuai kualitas sumber daya manusia yang dapat berprestasi dalam bidang yang ditekuni untuk mencapai tujuan. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Dengan ini

akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk penuh keseimbangan hak dan kewajiban, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya (Wrihatnolo R & Nugroho R: 2007).

Menurut Sumodingningrat (2004: 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi (Teguh, 2004: 82-83):

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri;
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- c. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan

tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Terjadinya keberdayaan pada tiga aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicitacitakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan, keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut (Teguh, 2004: 80-81).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan memahas hasil penelitian serta mempermudah penulis dalam menentukan perihal wawancara, maka diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau

status sosial. Adapun beberapa indikator yang tercantum dalam 4 (empat) peran pemerintah untuk pembangunan (Siagian, 2016) antara lain :

a. Peran Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

b. Peran sebagai inovator

Pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator yaitu memberikan inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru dan menjadi sumber dari hal-hal baru.

c. Peran sebagai modernisator

Pemerintah bertugas mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang ada.

d. Peran sebagai pelopor,

Pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikan oleh orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat “*people centered, partipatory, empowering and subtainable*” (Suharto. 2009).

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani telah dilakukan oleh peneliti–peneliti sebelumnya yang digunakan penulis sebagai rujukan. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Hamid, Hendrawati (2018) tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan petani yang dilaksanakan telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal (produksi padi tahun 2013 6,5 ton/han menjadi 7,58 ton/ha (2015). Kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengadaaan alsintan, program PUAP, dll. Faktor penghambatnya: kondisi jaringan irigasi belum memadai, ketersediaan benih padi dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan, jumlah alsintan belum memadai, pembinaan manajemen kelompok belum optimal.
2. Soetarto, Besti dan Sabali (2019) melakukan penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan

Hasil Panen Padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panen padi, menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerjasama kepada Dinas Pertanian dan Kelautan dalam hal memberikan fasilitas pertanian seperti menyediakan mesin pembajak (Jetor), mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih, mesin perontok padi dengan bermitra kepada penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani. Pemberdayaan masyarakat kelompok tani di kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli selama ini sudah terlaksana dan telah dirasakan oleh masyarakat petani dengan baik, tetapi di samping itu masih ditemukan hambatan-hambatan seperti lahan pertanian yang semakin hari berkurang, kepemilikan lahan pertanian dan irigasi yang tidak tersedia. Peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat petani lebih mengupayakan lagi kepentingan masyarakat dalam bentuk kebijakan sehingga masyarakat tidak mengalami kewalahan untuk mengerjakan program dari Pemerintah Daerah yaitu program kelompok tani.

3. Ahmar, Mappamiring dan Anwar (2016) dalam penelitiannya mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai sudah berjalan meskipun sepenuhnya belum efektif, disamping itu petani masih merasakan adanya kendala dari bantuan yang diterima terutama bantuan bibit dan pupuk yang dianggap bisa meningkatkan produksi lahan pertanian. Hal ini

menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintah mendapatkan bibit unggul dan pupuk yang ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan kondisi lahan pertanian di Desa Parumpanai sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat.

4. Nurdin, Nurmaeta dan Tahir (2014) dalam penelitiannya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan

analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Sugiyono (2016: 15) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan baru dalam bentuk uraian dan paparan dari hasil penelitian.

2. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015;163). Informan kunci, yaitu orang yang dipandang tahu permasalahan

yang di teliti. Adapun yang di maksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Yang masing-masing memiliki masa kerja tiga tahun sampai sekarang. Sedangkan informan non kuncinya adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016: 300), penentuan informan yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan. Dengan informan kunci yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Koordinator Penyuluhan Kabupaten Ngawi, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Alasan peneliti memilih para informan tersebut karena peneliti merasa beliau-beliau tersebut yang lebih memahami tentang seluk beluk permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara wawancara narasumber

yang sudah dipilih dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara tape recorder dan observasi mendalam oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung. Sumber sekunder ini sebagai penunjang atau melengkapi data primer seperti melalui bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi yang sudah ada dan tertulis. Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara Studi Literatur yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, buku, karya ilmiah, berbagai pendapat ahli yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Menurut Sugiyono

(2016: 310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak bestruktur. Penelitian ini termasuk kedalam observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 311) sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam karena peneliti melihat dan mengamati sendiri kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan pertanian padi organik di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, seperti melakukan hubungan dengan pihak Dinas Pertanian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Teknik ini melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku/ aktor) sehubungan dengan realita atau fenomena yang dipilih untuk diteliti. Secara praktiknya di lapangan, juga disuguhkan pertanyaan seputar lingkup penelitian yang ditujukan pada responden utama. Untuk memperoleh

validitas data, tentunya juga dilakukan usaha untuk memperoleh tanggapan atau jawaban mendetail dari setiap pertanyaan yang diutarakan. Penelitian ini akan melakukan pengembangan-pengembangan dari *interview guide* yang ada, hal ini dilandasi pada jawaban yang diberikan responden.

Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya terpaku pada *interview guide* yang ada, tetapi juga mengikuti alur dan kondisi pembicaraan dari pihak responden. Pelaksanaannya juga mengupayakan hasil yang diperoleh dari wawancara sifatnya jujur. Proses wawancara ini dikemas dalam suasana santai dan tidak terlalu formal, tujuannya adalah agar dapat menimbulkan kedekatan emosional antara kedua belah pihak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2016:329). Hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, juga di dukung dengan dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar atau dokumen hasil pengolahan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Selain itu juga melakukan pencatatan hasil wawancara yang telah di lakukan.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016: 334). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (2009: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan,

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/ transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian

seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keabsahan Data

Kredibilitas merupakan istilah yang di gunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggantikan konsep validitas. Menurut Sugiyono (2016: 368), dalam

penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi 1) uji kredibilitas data, 2) uji transferabilitas, 3) uji dependabilitas, 4) uji konfirmabilitas, dimana uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Pengujian kredibilitas data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi sebenarnya peneliti mengumpulkan data mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber, adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik sama. Sedangkan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016;330). Dari sumber data tersebut kemudian oleh peneliti di deskripsikan dan di kategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik untuk menghasilkan kesimpulan.